

**PERAN POLISI DALAM PERANG KEMERDEKAAN II DI SURAKARTA
TAHUN 1948-1949**

JURNAL

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra



Oleh:

PUTRI NUR INDAH L

12407144008

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

PERAN POLISI DALAM PERANG KEMERDEKAAN II DI SUARAKARTA TAHUN 1948-194

Oleh:

Putri Nur Indah L
12407144008

Abstrak

Kedatangan Belanda ke Indonesia pasca proklamasi ditentang oleh seluruh rakyat Indonesia. Aksi tersebut diwujudkan melalui peristiwa heroik di beberapa tempat di Indonesia. Situasi diperparah dengan pembatalan perjanjian Renville dan serangan Agresi Militer ke II oleh pihak Belanda. Perlawanan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali kesatuan polisi. Berdirinya kepolisian berpengaruh pada kekuatan militer pertahanan dan sebagai tugas untuk menjaga keamanan. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan kondisi Surakarta masa Jepang, pembentukan struktur organisasi Kepolisian Surakarta dan peranannya dalam menghadapi Perang Kemerdekaan II di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan Surakarta masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 memiliki sistem pemerintahan yang dirombak Jepang sehingga memunculkan cikal bakal Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*), juga keterlibatan aksi revolusioner Polisi Surakarta dalam kemerdekaan RI melawan Jepang. Keberadaan polisi mulai berkembang dengan membentuk sistem organisasi polisi di Surakarta, kesatuan-kesatuan tiap daerah yang memiliki struktur bagian masing-masing daerah. Polisi Surakarta juga berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Sebagai kesatuan militer peran polisi terlibat dalam aksi penumpasan PKI di Madiun 1948, dan Agresi Militer Belanda II dalam Serangan Umum Empat Hari di Surakarta tahun 1949. Selama pertempuran berlangsung di Surakarta polisi beserta kesatuan tempur lainnya melawan Belanda menghadapi serangan dari darat maupun udar. Kesatuan polisi diperkuat dengan membentuk Mobile Brigade Karesidenan (MBK) sebagai wujud perlawanan Agresi Militer ke II, hingga Surakarta dapat direbut kembali dari pihak Belanda di bawah pengawasan *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI).

Kata kunci: *Polisi, Perang Kemerdekaan II, Surakarta.*

THE POLICE ROLE IN INDEPENDENCE WAR II IN SURAKARTA 1948-1949

By:

Putri Nur Indah L
12407144008

Abstract

The arrival of Dutch to Indonesia after proclamation is not accepted by the people of Indonesia. This action implemented by the heroic incident in many places in Indonesia. This situation is getting worse with the Renville agreement has been cancelled and invasion Military Agression II by Dutch. Rebellion is doing by the people of Indonesia, including united police. The united police influences the defense military's strength and as their duties to look after the security. The purpose of the research is describing the condition of Surakarta during Japan's invasion to form organization of police in Surakarta and its role to face independence war II in Surakarta. The result of this research shows Surakarta during Japan's invasion in 1942-1945 has government system that has been change by Japan, so it reveals the pioneer of Special Police (*Tokubetsu Keisatsu Tai*), also the involve revolutionary action police of Surakarta in independence of RI against Japan. The existence of police starts to evolve by forming police organization system in Surakarta. The unity its each region has structure in them. Surakarta police has function also as defense tool of nation. As military unity police role involve in extermination PKI in Madiun 1948 and Dutch Military Agression II to in general attack for four days in Surakarta 1949. During the battle in Surakarta the police with another fighting unity against Netherland to face attack from land and air. This police unity is strengthened by forming Mobile Brigade residency (MBK) as implementation against Military Agression II, until Surakarta can take back from Dutch under authority of *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI).

Keyword : *Police, Independence War II, Surakarta.*

A. PENDAHULUAN

Pada masa pendudukan Jepang, polisi sebagai alat perlengkapan pemerintah membantu usaha peperangan dan turut dalam pertahanan penjagaan dari serangan musuh. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri juga ditujukan kepada usaha preventif. Segala sesuatu diurus oleh penguasa militer, tetapi ada bidang yang perlu

diperhatikan oleh tentara pendudukan Jepang, yakni persoalan ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai tindak pidana kriminal. Oleh karena itu, dibentuklah Pasukan Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) yang merupakan kesatuan berbobot tempur militer, sehingga polisi pada masa itu pun dilengkapi dengan senjata oleh tentara Jepang. Pada akhirnya, polisi menjadi suatu kekuatan penting dalam kekuatan tempur Indonesia di masa berikutnya. Polisi diperkuat dengan mantri polisi dan pamong praja karena pamong praja dimasukkan dalam dinas polisi. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mampu menumbuhkan semangat rakyat Indonesia melucuti tentara Jepang.

Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Kepolisian Indonesia memasuki sebuah era baru, yakni dapat mengatur sistem organisasi sendiri. Namun ini tidak dapat diartikan bahwa pada saat itu keadaan telah membaik sepenuhnya. Oleh karena itu, timbullah revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi yang demikian, hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami kekacauan dan kecemasan yang membaur menjadi satu dengan pekik dan sorak-sorai kemerdekaan. Seiring situasi keamanan nasional yang semakin mencekam, maka pemerintah pusat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1945, mengeluarkan dekrit berisi peleburan Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi organisasi ketentaraan resmi yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).¹

Surakarta sebagai salah satu kota penting dalam percaturan politik Indonesia, khususnya sejak awal abad kedua puluh, cukup rawan terhadap konflik. Di kota ini juga terjadi aksi penculikan, bahkan kerusuhan seringkali terjadi. Oleh karena itu, revolusi yang terjadi pasca proklamasi tahun 1945, khususnya dalam bidang militer sangat berpengaruh besar pada kehidupan di Surakarta. Banyak pejabat terutama

¹ Iwa Kusumasumantri, *Sedjarah Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1970), hlm. 43.

polisi dan pamong praja dari zaman kolonial Hindia Belanda menjadi korban masa awal revolusi fisik tersebut.²

Masa Perang Kemerdekaan II peran militer tersebut dipentingkan tidak hanya oleh TNI tetapi polisi juga bergerak untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan Kepolisian Surakarta pada masa revolusi cukup menarik untuk dilihat lebih jauh dalam perspektif sejarah. Berbagai peristiwa besar yang berskala nasional, dan juga internasional memberi pengaruh pada situasi dan kondisi Kepolisian Surakarta, baik sebagai institusi maupun alat negara. Dalam sejarah Indonesia, aspek militer menjadi bagian penting, namun polisi sepertinya tidak banyak disebutkan dengan baik, padahal kontribusi mereka cukup menentukan situasi dan kondisi suatu masyarakat.

Melalui Perjanjian Renville, terbentuklah negara federal di Indonesia yang kemudian mendapat pertentangan dari pihak republik. Pada situasi yang demikian, polisi (termasuk polisi di Surakarta) merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan sekaligus sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Surakarta. Polisi Surakarta menjadi bagian terpenting dari masa revolusi di Jawa Tengah. Tidak hanya persoalan dengan Belanda, tetapi juga dengan Peristiwa Madiun 1948. Polisi Surakarta mengambil bagian sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

B. KEADAAN SURAKARTA TAHUN 1942-1945

Surakarta merupakan bagian *Vorstenlandaen* yaitu daerah wilayah Hindia Belanda yang memiliki status khusus. Luas keseluruhan Karesidenan Surakarta

² Iwa Kusuma Sumantri, “Analisa Tentang Peristiwa – Peristiwa disekitar Proklamasi Kemerdekaan Indoensia,” dalam *Penelitian Sejarah*, 1 Maret 1961, No. 2-tahun ke II, (Jakarta: Yayasan “Ilmiah Lembaga Ilmiah Indonesia Penyelidikan Sejarah, 1961), hlm. 3.

diperkirakan seluas 6.217 km² dari pusat Kota Surakarta.³ Pada tanggal 5 Maret 1942 pasukan Jepang mulai menduduki daerah pedalaman Jawa salah satunya di wilayah Surakarta. Jepang lebih mementingkan kekuatan militernya yang dipimpin oleh Komandan Funabiki. Pada masa pendudukan Jepang perubahan tata pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 27 Tahun 1942 menyangkut perubahan-perubahan keorganisasian pemerintahan daerah bahwa seluruhnya Jawa kecuali *Vorstenlanden* terbagi atas karesidenan (*shu*), kotapraja (*si*), kabupaten (*ken*), distrik (*gun*), onder distrik (*son*), kelurahan (*ku*). Tugas setiap *shu* ada tiga bagian yang mengurus tentang pemerintahan umum (*neiseibu*), bagian perekonomian (*keiseibu*), dan bagian kepolisian (*keisatsubu*). *Keisatsubu* selain dibentuk di karesidenan juga dibentuk dalam wilayah kotapraja.⁴

Pemerintahan Jepang menawarkan pola mobilitas sosial baru bagi penduduk bumiputra, melalui pembentukan kelompok militer dan semi militer. Seperti *Heiho*, *Keibodan*, *Seinendan* dan Pembela Tanah Air (PETA) yang telah membentuk pemuda dan keluarganya memiliki status sosial yang baru.⁵ Surakarta merupakan milik Kasunanan dan sebagian lainnya milik Mangkunegaran. Wilayah Surakarta *kochi* (Kasunanan) terdiri dari Kota Surakarta *ken*, Sragen *ken*, Klaten *ken* dan Boyolali *ken*. Wilayah Mangkunegaran *kochi* terdiri dari 2 *ken* yaitu Wonogiri *ken* dan Kota Surakarta *ken* yang meliputi sebagian wilayah Surakarta bagian utara, Kaduwong, Loroh dan Mateseh (selanjutnya disebut Karanganyar).

³ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830 – 1839*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1989), hlm. 2.

⁴ Dwi Ratna Nurhajarini, “Dari Tokubetsu Keisatsutai ke Polisi Istimewa: Kepolisian di Surabaya Pada Awal Kemerdekaan”, dalam *Jurnal Patrawidya* (Vol. 12, No. 2, 2011), hlm. 260.

⁵ Bambang Purwanto, “Historiografi dan Legitimasi Peran Sosial Politik Militer di Indonesia”, dalam Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, *Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2000), hlm. 142.

Salah satu komponen penting dari perangkat negara yang dibutuhkan penguasa militer Jepang adalah Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*). Sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dibidang ketertiban dan keamanan, pemerintah Jepang membentuk pasukan mobil yang dipersenjatai secara lengkap. Pasukan tersebut dinamakan *Tokubetsu Keisatsu Tai*, merupakan lembaga polisi yang dibentuk Jepang yang akhirnya banyak terlibat dalam pelucutan senjata di tangsi-tangsi militer Jepang. Tugas polisi masa Jepang juga disesuaikan dengan kepentingan untuk melawan sekutu dan diarahkan untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pertahanan maupun kepentingan kekuasaan Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, tugas polisi diarahkan pada pemberantasan dan pencegahan terhadap gerakan anti kekuasaan pemerintah Jepang. Akhir tahun 1944 *Tokubetsu Keisatsu Tai* memiliki kekuatan satu kompi yang beranggota antara 20-60 orang. Kompi tersebut berada di bawah kekuasaan polisi karesidenan yang pada umumnya berpangkat Itto Keibu (Letnan Satu).⁶

C. TERBENTUKNYA KEPOLISIAN DI SUARAKARTA

Kantor kepolisian tertinggi di Surakarta adalah Polisi Karesidenan Surakarta (*Surakarta Syu Chiangbu*), kemudian polisi karesidenan tersebut membawahi *Keisatsu Syu* atau kantor-kantor Kepolisian Karesidenan Surakarta dan *Surakarta Syu Tokubetsu Keisatsutai* atau Pasukan Polisi Istimewa Karesidenan Surakarta. Pemimpin Kepolisian Negara pertama kali ialah R.M Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang sebelumnya menjabat Komisaris Polisi Kelas I pada Sekolah Polisi di Sukabumi dan tanggal 29 September 1945 beliau diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara

⁶ Atim Supomo, Djumarwan, dan Masqudori, *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 22.

RI.⁷ Setelah Kemerdekaan Indonesia Kepolisian Surakarta tahun 1947 hingga tahun 1950 dikenal dengan nama Komawil (komando wilayah).

Berdasarkan penetapan surat keputusan tanggal 1 Desember 1947 No. Pol. 4/3/1/St/o, Jawatan Kepolisian Negara sementara yang berkedudukan di Yogyakarta mulai tanggal 1 Desember 1947 menetapkan tenaga dari jawatan sebagai pusat dari Kepolisian Negara RI. Susunan kepolisian diantaranya bagian organisasi, bagian urusan pegawai, tata usaha, keuangan, materiil, Polisi Istimewa, Pengawas Aliran Masyarakat (PAM), pengusut kejahatan, sekertariat.⁸

Seiring perkembangan zaman polisi mengalami pertumbuhan organisasi yang kuat saat itulah aksi Agresi Belanda I tahun 1947 Polisi Negara Republik Indonesia dimiliterisasikan. Mulai tanggal 1 Agustus 1947 Kepolisian Negara RI yang ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara No. 112.⁹ Instruksi militerisasi tersebut pada hakekatnya adalah penegasan secara administratif instrumental, karena secara praktis polisi melaksanakan tugas-tugas militer sejak awal proklamasi.¹⁰ Setiap wilayah dipantau oleh Kepala Polisi Karesidenan dan Kepala Mobil Brigade dengan melihat keadaan dan kedudukan anggota Mobil Brigade yang menjalankan tugasnya. Sebagai perlengkapan tugas bagi ketentaraan oleh kesatuan-kesatuan polisi disediakan oleh Kepala Polisi Karesidenan dan Kepala Mobile Brigade Besar (Banyumas, Surakarta dan Malang).¹¹ Berdasarkan Surat Perintah Kepala Muda

⁷ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: PTIK Press, 2007), hlm. 18.

⁸ ANRI, *Kepolisian Negara 1947-1949*, No. 10.

⁹ INKOPAK, *20 Tahun Perkembangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta: Mabes Polri, 1967), hlm. 78.

¹⁰ Sidik Kartopati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1967), hlm. 70.

¹¹ Awaloedin Djamin, *op.cit.*, hlm. 23.

Kepolisian No. Pol: 12/78/91 tanggal 14 November 1946 secara resmi Mobil Brigade telah lahir.¹² Kesatuan-kesatuan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) dibentuk dengan kekuatan satu kompi dan sebagai komandan kompi berpangkat Inspektur Polisi (IP) satu dan dua. Dibentuk pula Mobile Brigade Besar (MBB) yang menempati wilayah provinsi dan sebagai pusatnya Mobile Brigade Besar Jawatan Kepolisian Negara (MBB-DKN) dengan pimpinan satu Batalyon.

D. POLISI DAN PERANG KEMERDEKAAN II DI SURAKARTA

Pada tanggal 8 September 1948, PKI pimpinan Musso mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun sebagai langkah pertama merebut kekuasaan Negara RI. Kekuatan bersenjata melawan PKI terdiri dari Brigade 29 yang berjumlah 6 Batalyon 2 Brigade dan kesatuan-kesatuan lain dari wilayah Surakarta. Situasi Surakarta yang memanas disertai pembunuhan dan penculikan Komandan Divisi Surakarta Dr. Muwardi.¹³ Pada tanggal 13 September 1948 terjadi peristiwa penyerangan markas Batalyon Siliwangi di Srambatan oleh pasukan yang berhaluan kiri dan menewaskan 14 orang.¹⁴

Mengingat Surakarta keadaannya semakin kacau dan banyak terjadi aksi kerusuhan sehingga Jawatan Kepolisian Negara RI memberikan instruksi gerakan serentak kepada anggota-anggotanya. Gerakan dilakukan pada tanggal 28 September 1948 melalui pemeriksaan semua rumah yang ada di dalam lingkungan dan diperiksa

¹² Atim Supomo, Djumarwan, dan Masqudori, *op.cit.*, hlm. 23.

¹³ Peristiwa penculikan Dr. Muwardi terjadi pada pukul 11.30 di rumah sakit Jebres yang sekarang menjadi RS. Dr. Muwardi. Bahwa Dr. Muwardi ditodong oleh orang yang tidak dikenal kemudian memaksanya masuk ke mobil. Lihat Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan Kriminalitas dan Kekerasan Revolusi di Surakarta*, (Wonogiri: Bina Citra Pustaka, 2004), hlm. 211.

¹⁴ Atim Supomo, Djumarwan, Masqudori, *op.cit.*, hlm. 91.

oleh Polisi Negara.¹⁵ Gerakan pemeriksaan pihak polisi menurunkan personil yaitu 6 Komisaris Polisi, 29 Inspektur Polisi, 18 Pembantu Inspektur Polisi, 40 Komandan Polisi dan 250 Agen.¹⁶ Pada akhirnya Madiun jatuh oleh pemerintahan Soekarno yang menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa PKI di Madiun berhasil ditumpas oleh militer.

Agresi Belanda merupakan perpecahan dan keretakan yang ada di dalam tubuh pemerintahan Republik Indonesia sebagai akibat peristiwa Madiun dan bisa dibangun hingga potensi nasional pulih kembali. Banyaknya tawanan akibat peristiwa tersebut dapat kembali bersatu dengan tenaga nasional dan menunjukkan sebagai pejuang kemerdekaan RI. Pada tanggal 20 Desember 1948 pasukan Belanda memasuki daerah Surakarta. Komandan Brigade V Letnan Kolonel Slamet Riyadi mengeluarkan perintah bahwa pada pukul 18.00 WIB dimulai pembumi hangusan dan jembatan-jembatan yang berada di dalam Kota Surakarta.¹⁷ Bunyi tembakan dan bom tanda dimulainya perang melawan Belanda. Sebagai pelopor pertama bom diledakkan oleh *Vennieling-corps* Tentara Pelajar dengan sasaran utama yaitu kantor Gubernur, Pasar Gede, Asrama Tentara Pelajar, Gedung Gajah Staf Divisi IV Timuran dan kantor pos.¹⁸

Pada tanggal 22 Desember 1948 Mayor Achmadi mengadakan konsolidasi di Jumantoro membentuk Komando Daerah Solo (KDS) dengan membagi pasukan ke dalam rayon-rayon. Medio satu bulan TNI bersama polisi dan rakyat berhasil melakukan konsolidasi pukulan-pukulan terhadap Belanda. Pertama kali yang

¹⁵ ANRI, *Kepolisian Negara RI 1947-1949*, No. 06.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Panitia Seksi Penggali Sejarah Monumen Sejarah Militer DAM VII/DIPONEGORO, *Mengenang Palagan Empat Hari di Surakarta tanggal 7 s/d 10 Agustus 1949*, (Surakarta: Panitia Peringatan Pertempuran Empat Hari di Surakarta, 1965), hlm. 19.

¹⁸ *Ibid.*

menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi Belanda. Kawat-kawat telepon diputus, jalur kereta api dirusak, dan konvoi-konvoi Belanda si siang hari diserang.

Sebagai bentuk pertahanan pemerintahan militer RI pada tanggal 15 Mei 1949 membentuk alat kepolisian dengan nama Polisi Pemerintahan Militer (PPM) yang merupakan penggabungan dari Polisi Negara dan Corps Pemerintahan Militer (CPM).¹⁹ Tiap-tiap Komando Distrik Militer (KDM) mempunyai bagian-bagian organisasi yang tersusun, sedangkan Komandan Detasemen dipimpin oleh pegawai polisi atau anggota CPM yang tertinggi pangkatnya.²⁰ Semasa Agresi Militer Belanda II melakukan perlawanan, menjelang diberlakukannya perintah penghentian tembakan-menembak antara RI dan Belanda.

Pada tanggal 3 Agustus 1949 telah tercapai persetujuan antara pemerintah RI dengan Belanda mengenai penghentian permusuhan dan pelaksanaan *case fire* yang berlaku pada tanggal 11 Agustus 1949. Serangan umum terhadap Kota Surakarta terjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama tanggal 7-9 Agustus 1949, gelombang kedua pada tanggal 10 Agustus 1949. Melalui perintah Letnan Kolonel Slamet Riyadi.²¹ Instruksi Letnan Kolonel Slamet Riyadi memiliki tujuan untuk memperkuat dukungan fisik dan mental terhadap kesatuan-kesatuan yang berada di dalam wilayah Komando SWK (*Sub Wehrkreise*) I06, kesatuan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) dan Tentara Pelajar.

2 Kompi Mobrig yaitu Kompi Mobile Brigade Besar Djawatan Kepolisian Negara (MBB-DKN) di bawah pimpinan P.I.P. Bakir yang bermarkas di Sarwakan Madyo Taman dan Kompi Mobile Brigade Karesidenan (MBK) Surakarta pimpinan

¹⁹ INKOPAK, *op.cit.*, hlm. 75.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 75-76.

²¹ Pusjarah TNI, *Sejarah TNI Jilid I*, (Jakarta: Markas Besar TNI Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hlm. 212.

P.I.P. Mulyono bermarkas di Batangan, Mangkudiningrat.²² Ikut dalam serangan di dalam Kota Surakarta. Sasaran utama peyerangan adalah pos-pos Belanda yang ada di luar Kota Surakarta dan kedudukan Belanda yang berlingkup menguasai Kota Surakarta. Pasukan polisi yang mengikuti serangan umum sebagai berikut.²³

1. Mobile Brigade Besar (MBB) di bawah komando Komisaris Utomo yang berkekuatan 100 orang dengan posisi di Rayon III.
2. Mobile Brigade Karesidenan (MBK) berkekuatan 100 orang dengan posisi di Rayon II dan kurang lebih 70 orang pasukan di Rayon I.

Pertempuran berlangsung 4 hari 4 malam hingga mencapai puncaknya pada tanggal 10 Agustus 1949, saat dilaksanakan serangan gelombang kedua. Sebagai sasarannya adalah semua obyek musuh di Kota Surakarta. Serangan ini tidak dimaksudkan untuk merebut kota, tetapi semata-mata untuk memberikan kesan kepada musuh bahwa TNI maupun polisi masih tetap kuat. Pada tanggal 24 Agustus 1949, Komando Kota Surakarta oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi diserahkan kepada Mayor Achmadi dan selanjutnya diadakan perundingan dengan pihak Belanda di bawah pengawasan *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI).²⁴

E. KESIMPULAN

Masa pendudukan Jepang polisi terbentuk semakin kuat dengan didikan militer yang diterapkan. Terbentuknya organisasi Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) di Indonesia didominasi oleh kaum penjajah yakni Belanda dan Jepang dengan disesuaikan kepentingan penjajah masing-masing. Keberadaan Polisi Surakarta menjadi salah satu bagian untuk mewujudkan tujuan utama Jepang yaitu Perang Asia Timur Raya. Pembentukan Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*)

²² Atim Supomo, Djumarwan, dan Masqudori, *op.cit.*, hlm. 110.

²³ Djoko Santosa, “Mengenang Heroik Para Pemuda Pejuang Pertempuran 4 Hari di Kota Solo”, dalam *Gemari* (Edisi 93, No. IX, 2009), hlm. 66.

²⁴ Pusjarah TNI, *op.cit.*, hlm. 213-214.

mengawali lahirnya kesatuan militer yang terlibat dalam pelucutan senjata di tangsi militer Jepang. Berdirinya Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) mengalami perkembangan salah satunya tiap karesidenan seluruh Jawa-Madura dengan fasilitas senjata yang lebih lengkap.

Terbentuknya Kepolisian Indonesia di bawah ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 19 Agustus 1945 termasuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Jawatan Kepolisian RI dipimpin oleh Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Pembentukan organisasi polisi diikuti tiap karesidenan. Struktur organisasi polisi pada bagian teratas dipimpin oleh Perdana Menteri kemudian disusun pada tiap-tiap bagian yaitu tata usaha, keuangan, perlengkapan, organisasi PAM (Pengawas Aliran Masyarakat), tata usaha dan kriminal. Kemudian Kepala Karesidenan terdiri dari bagian umum, PAM dan kriminal. Wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari Kabupaten Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar dan Kota Surakarta.

Tugas polisi berpegang teguh pada undang-undang negara dan peraturan pemerintah. Perkembangan selanjutnya polisi memiliki kesatuan-kesatuan yaitu Pasukan Polisi Istimewa, Persatuan Polisi Perjuangan dan Barisan Polisi Istimewa. Kesatuan polisi melebur dalam militerisasi Kesatuan Kepolisian Negara RI. Pada tanggal 14 November 1946 secara resmi Mobile Brigade lahir yang terhimpun dalam kesatuan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) dengan pusatnya Mobile Brigade Besar Djawatan Kepolisian Negara (MBB-DKN).

Tahun 1948 di Surakarta terjadi kekacauan yang mengakibatkan perpecahan politik antara pihak Amir Syarifuddin dan Mohammad Hatta. Salah satunya Surakarta sebagai proyek PKI dengan Sasaran utama yang dijadikan sebagai basis PKI ialah daerah Madiun yang dinilai sebagai daerah strategis dan dijadikan basis gerilya untuk perjuangan jangka panjang. Pimpinan Kepolisian Karesidenan Surakarta Saleh Sastranegara meminta bantuan kekuatan kepada pimpinan Jawatan Kepolisian Negara, menugaskan Mohammad Yasin sebagai kepala Mobile Brigade Besar

wilayah Jawa Timur. Selain itu menugaskan satu tim penyelidik untuk berangkat ke Surakarta dengan tujuan menumpas PKI di Madiun.

Tanggal 21 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan sasaran memasuki Kota Surakarta. Serangan dilakukan dalam dua gelombang dari tanggal 7-9 Agustus 1949. Gelombang kedua tanggal 10 Agustus 1949, sesuai dengan perintah Let. Kol Slamet Riyadi. Pertahanan staretgi yang diatur oleh Let. Kol Slamet Riyadi membentuk Rayon-rayon dengan tujuan melemahkan pihak Belanda terhadap aksi Serangan Umum Empat Hari. Pertempuran berlangsung selama 4 hari 4 malam dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 Agustus 1949. Pasukan TNI dan polisi bersama rakyat menghadapi serangan besar-besaran Belanda. Melalui bantuan kesatuan TNI dan polisi Laskar-laskar seperti Tentara Genie Pelajar, Tentara Pelajar, Hizbullah yang berada di dalam wilayah Komando SWK 106 pimpinan Mayor Ahmadi memiliki tujuan untuk memperkuat dukungan melawan serangan Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, No. 06.

ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, No. 10.

Buku, Jurnal, dan Artikel:

Atim Supomo, Djumarwan, dan Masqudori, *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Awaloedin Djamin *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta:PTIK Press, 2007.

Bambang Purwanto, "Historiografi dan Legitimasi Peran Sosial Politik Militer di Indonesia", dalam Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, *Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, Yogyakarta: UGM Press, 2000.

Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830 – 1839*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.

Dwi Ratna Nurhajarini, “Dari Tokubetsu Keisatsutai ke Polisi Istimewa: Kepolisian di Surabaya Pada Awal Kemerdekaan”, dalam *Jurnal Patrawidya* Vol. 12, No. 2, 2011.

INKOPAK, *20 Tahun Perkembangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: Mabes Polri, 1967.

Iwa Kusuma Sumantri, “Analisa Tentang Peristiwa – Peristiwa disekitar Proklamasi Kemerdekaan Indoensia,” dalam *Penelitian Sejarah*, 1 Maret 1961, No. 2-tahun ke II, Jakarta: Yayasan “Ilmiah Lembaga Ilmiah Indonesia Penyelidikan Sejarah, 1961.

_____, *Sedjarah Revolusi Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1970.

Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simping Bengawan Kriminalitas dan Kekerasan Revolusi di Surakarta*, Wonogiri: Bina Citra Pustaka, 2004.

Panitia Seksi Penggali Sejarah Monumen Sejarah Militer DAM VII/DIPONEGORO, *Mengenang Palagan Empat Hari di Surakarta tanggal 7 s/d 10 Agustus 1949*, Surakarta: Panitia Peringatan Pertempuran Empat Hari di Surakarta, 1965.

Pusjarah TNI, *Sejarah TNI Jilid I*, Jakarta: Markas Besar TNI Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000.

Sidik Kartopati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1967.

SKRIPSI dan DISERTASI

Annisa Tri Wahyuni, “Perkembangan Polisi Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) di Indonesia Tahun 1945-1950”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

Genoveva Ambar Wulan, “Polisi dan Politik: Peranan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) Jawatan Kepolisian Negara RI Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949”, *Disertasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Koidah , “Sekolah Darurat di Sendang Agung Pada Masa Agresi Militer Belanda II (1948 – 1949)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

Nur Rahmawati, “Peranan Polisi Pelajar Pertempuran (P3) dalam Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

SURAT KABAR dan MAJALAH

Djoko Santosa, “Mengenang Heroik Para Pemuda Pejuang Pertempuran 4 Hari di Kota Solo”, *Gemari* , Vol. 93, No. IX, 2009.

Merdeka, 17 Februari 1946.

Pembimbing



Drs. Djumarwan
NIP. 19560101 198502 1 001

Yogyakarta, 8 September 2016
Mengetahui
Reviewer



Danar Widiyanta M.Hum.
NIP. 19681010 199403 1 001